

Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ARUM SARI PUSPA DEWI
NIM. 152121091

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ARUM SARI PUSPA DEWI

NIM. 152121091

Surakarta, 10 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP: 19840202 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARUM SARI PUSPA DEWI
NIM : 152121091
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Mei 2020



Arum Sari Puspa Dewi

Fery Dona, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syar'ah

Sdri : Arum Sari Puspa Dewi

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara:

Nama : Arum Sari Puspa Dewi

NIM : 152121091

Judul : **Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin
Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten
Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt).**

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 22 Mei 2020
Dosen Pembimbing



Fery Dona, S.H., M.Hum
NIP. 19840202 201503 1 004

PENGESAHAN

**Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum
Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)**

Disusun Oleh:


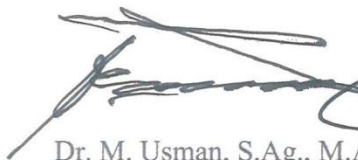
ARUM SARI PUSPA DEWI
NIM. 152121091

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020/26 Dzulkaidah 1441
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19681227 199803 1 003


Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP: 19701012 199903 1 002



Lila Pangestu H, S.Pd., M.Pd
NIP: 19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
(QS. An-Nisa: 1)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2015), hlm 77.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, skripsi ini telah terselesaikan berkat semua orang yang berperan dan memberikan makna dalam kehidupanku, sehingga skripsiku ini ku persembahkan kepada :

1. Orang tua, Bapak Moh. Komar Ma'ruf, Ibu Mayatri Nur Tjahyanti orangtuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik, menasehati, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhamu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rejeki yang barokah kepada keluargaku. Aamiin.
2. Adik-adikku tersayang, Bintang Gumilang Cahya Buana dan Kusuma Putri Cahyaning Sukma yang memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku dan kalian penyemangatku.
3. Sahabat-sahabatku, khususnya Febby Bella Sintya Sulistyowati, Aldila Devita, Aisyiyah Ilma, dan Aldhila Paramitha kalian sebagai penyemangat, senantiasa mendoakan, membantu, menasihati, menghibur dan menerima segala keluh kesahku.
4. Partner Everything, Septian Bayu Pamungkas yang selalu memberikan support, mendoakan, membantu, serta selalu sabar dan menerima keluh kesahku.
5. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Ismiyati, S,H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Klaten yang telah bersedia memberikan informasi perkara untuk penelitian ini.
7. Dosen-dosen yang telah mengajar, membimbing dan mendidikku.
8. Teman-teman HKI C tahun 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu.
9. Dan semua keluarga, sahabat dan teman-teman yang tak bisa kusebut satu per satu yang telah mendoakan dan menyemangatiku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| (—) | Fathah | A | A |
| (ـِ) | Kasrah | I | I |
| (ـُ) | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbanā |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل | Ar-rajulu |
| 2. | الْجَلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أَكَل | Akala |
| 2. | تَأْخُذُونَ | Ta'khuzūna |
| 3. | النَّوْ | An-Nau' |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| 2 | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---------------------------|---|
| 1 | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2 | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt . Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau Sarjana di IAIN Surakarta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyah).
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag sebagai dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing sejak awal.
5. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Dra. Hj. Ismiyati, S,H sebagai Hakim Pengadilan Agama Klaten yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang digunakan untuk penelitian.
8. Bapak Ibu Akademik yang telah mempermudah dalam mengurus kebutuhan administrasi akademik penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2015 khususnya kelas C, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

10. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya skripsi ini.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 22 Mei 2020

Arum Sari Puspa Dewi
NIM. 152121091

ABSTRAK

ARUM SARI PUSPA DEWI, NIM: 152121091 **“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”**

Perkawinan poligami adalah perkawinan dimana suami mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan. Dalam hal seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, ada kecenderungan masyarakat melakukan penyimpangan demi terwujudnya poligami tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah mendapatkan izin dari istri pertama dan harus mendapat izin dari Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan pembatalan poligami. Hal ini terjadi pada perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Permohonan pembatalan poligami yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan poligami suaminya (Termohon) dengan wanita lain karena Termohon melakukan perkawinan poligaminya tanpa adanya izin dari Pemohon. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembatalan poligami tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *literer* (kepuustakaan) yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : perkawinan poligami, syarat-syarat poligami, pembatalan poligami, akibat hukum pembatalan poligami.

ABSTRACT

ARUM SARI PUSPA DEWI, NIM: 152121091 “The Cancellation Of Polygamy Because There Is No Permission From The First Wife Perspective of Constitution Number 1 1974 about Marriage And Compilation Of Islamic Law (Study about the Decision of Klaten’s Religious Court Number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”.

Polygamy is a marriage where the husband has more than one wife at the same time. In this case, a man who wants to do polygamy has to fulfill the applicable requirements. Because of the many requirements that have to be fulfilled, people tend to do digression in order to realize polygamy. One of the requirements that should be fulfilled is getting the permission from the first wife and the permission from Court as regulated in the article number 4 and 5 from the Constitution Number 1 1974 about Marriage. If there is a digression from the requirements stated above, the first wife may propose a cancellation of the polygamy. It happens in the case Number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. It is a request for cancellation of polygamy that was proposed by the first wife toward her husband who married another woman because there is no permission from the first wife. Therefore, the author is interested to discuss about the Judge’s Consideration and Legal Consequences of case decision number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.

The purpose of this study is: Firstly, to understand about Judge’s Consideration in giving a decision of the case. Secondly, to understand what Legal Consequences appear after the cancellation of polygamy viewed from the Constitution Number 1 1974 about Marriage.

This research is a literature research that focuses on Judge’s Decision of Klaten’s Religious Court Number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. The data that is used in this research are primary and secondary data collected through documentation, interviews and then being analyzed using descriptive analysis technique.

Based on research analysis, it can be concluded that the Judge grant the wish of the first wife and cancel the polygamy marriage of the husband with a consideration of the facts that exist in the trial which is in accordance with existing legislation.

Keywords: Polygamy Marriage, Polygamy Requirements, Cancellation of Polygamy, Legal Consequences

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN. POLIGAMI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN | 23 |
| A. Perkawinan..... | 23 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 23 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 24 |
| 3. Hukum Perkawinan..... | 25 |
| 4. Rukun dan Syarat Perkawinan | 26 |
| 5. Hikmah Perkawinan..... | 27 |

| | |
|--|----|
| B. Poligami | 28 |
| 1. Pengertian Poligami | 28 |
| 2. Dasar Hukum Pengaturan Poligami | 29 |
| 3. Syarat-syarat Poligami | 31 |
| 4. Prosedur Poligami | 33 |
| 5. Hikmah Poligami | 34 |
| C. Pembatalan Perkawinan | 34 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 34 |
| 2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan | 35 |
| 3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan | 38 |

BAB III PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERKARA NOMOR 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt..... 40

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten | 40 |
| 1. Lahirnya Pengadilan Agama Klaten | 40 |
| 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Klaten | 42 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten | 43 |
| 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten | 45 |
| 5. Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama Klaten | 45 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 48 |
| 1. Duduk Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 48 |
| 2. Pertimbangan dalam Pokok Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 51 |
| 3. Penetapan Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 54 |
| C. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 55 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt57

| | |
|--|----|
| A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 57 |
|--|----|

| | |
|--|-----------|
| B. Akibat Hukum Pembatalan Poligami di Pengadilan Agama Klaten pada perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt | 62 |
| 1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri | 63 |
| 2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak..... | 64 |
| 3. Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan..... | 64 |
| 4. Akibat Hukum Terhadap Orang Ketiga | 65 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri. Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. Anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹²

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat yang menerangkan tentang suatu perkawinan. Ayat-ayat tersebut dapat dijadikan umat muslim sebagai tuntunan atau pedoman suatu jembatan yang mengantarkan umat muslim baik

¹²Alfian Hadiputra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)", *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Undip Semarang, Semarang, 2009, hlm. 3.

laki-laki maupun perempuan menuju kehidupan yang sakinah. Salah satunya dalam Surah Ar-Rum(30):21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan ialah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenteram dan memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.³ Perkawinan tidak saja sebagai jalan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2015), hlm. 406.

³Ilyas, "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2014. hlm. 2.

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.⁴ Namun dalam kasus tertentu seperti poligami dapat menjadi salah satu kendala yang bisa dikatakan sulit untuk dilakukan, bahkan penyelesaiannya pun dilakukan dengan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam karena mengingat syarat-syarat yang cukup rumit. Selain itu, adanya perkawinan poligami juga menjadi perbincangan masyarakat. Bahwa perkawinan poligami dipandang buruk dan mendapat penolakan oleh banyak pihak karena yang telah terjadi dalam praktiknya bahwa perkawinan poligami banyak dampak negatifnya seperti tidak adanya keadilan satu sama lain, suami meninggalkan perkawinan pertamanya dan lebih memihak perkawinannya dengan istri keduanya.⁵

Untuk menghindari hal-hal buruk yang diakibatkan dalam perkawinan poligami seperti yang sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian (persyaratan) terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (1) “ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

⁴Somieyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 2006), hlm. 10.

⁵*Ibid.*

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”.⁶

Dapat dilihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI memperbolehkan adanya perkawinan poligami dengan dipenuhinya beberapa persyaratan bagi seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

Tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhammad SAW, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Untuk dapat memahami makna poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad SAW.⁷

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami membuat tidak sedikit seorang suami melakukan poligami secara diam-diam dan tidak jujur. Karena poligami yang dilakukan secara diam-diam dan tidak jujur dalam perkawinan poligaminya, maka perkawinan poligaminya dapat diputuskan ikatan perkawinannya atau dibatalkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

⁷Somieyati, *Hukum Perkawinan dan...*, hlm. 4.

Batalnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.⁸

Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan terhadap perkawinan sah yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁹

Berdasarkan ketentuan dari Pasal-pasal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri yang dipoligami mengajukan pembatalan perkawinan.

Maka dari itu, penulis meneliti sebuah kasus yang bermula seorang suami (Termohon) yang telah menikah dengan istrinya (Pemohon) pada tanggal 25 Maret 2006 dan telah memiliki seorang anak. Kemudian Termohon melakukan poligami dengan perempuan lain yaitu Turut Termohon I tanpa sepengetahuan istrinya (Pemohon). Poligami tersebut terjadi karena Turut

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IV Pasal 22 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Termohon I sedang mengandung anak dari hasil hubungan badan dengan Termohon. Tanpa adanya izin dari istri pertama (Pemohon) dan pengadilan, maka Termohon memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus bujang yang perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Sei Bedug Kabupaten Batam Kepulauan Riau (Turut Termohon II).¹⁰

Karena pemohon selaku istri pertama mendapat informasi perkawinan suaminya (Termohon) dengan perempuan lain (Termohon I) dan merasa dibohongi serta sangat dirugikan, maka Pemohon kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami suaminya (termohon) dengan turut termohon I ke Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kemudian Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara suaminya (termohon) dengan istri keduanya (turut termohon I) yang diajukan oleh Pemohon dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.¹¹

Dari kasus perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan Penulisan mengenai dasar yang dijadikan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan juga penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul setelah dijatuhkannya putusan pembatalan perkawinan tersebut dalam bentuk Penulisan yang berjudul **“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”**.

¹⁰Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt perihal Pembatalan Perkawinan, 19 Juli 2017.

¹¹*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA. Klt?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA. Klt?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/2016/PA. Klt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama di Pengadilan Agama Klaten dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/2016/PA. Klt.

2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama di Pengadilan Agama Klaten dalam perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/2016/PA. Klt.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, dan bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum. Khususnya di bidang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya dalam penegakkan hukum secara teori dan praktik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada para pembaca dan sebagai kajian baru terhadap permasalahan Hukum Keluarga Islam dalam hal pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama. Dan juga dapat dipergunakan sebagai referensi para penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk masalah-masalah khususnya pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama.

E. Kerangka Teori

1. Poligami

a. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Menurut Peraturan Perundang-undangan beberapa landasan hukum pengaturan hukum pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Pada azasnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Tetapi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹²

Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dalam hal seorang suami

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 ayat (1) dan (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

b. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:¹⁴

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

¹³Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, ed. Muslimin Kara, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 371.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:¹⁵

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Pembatalan Perkawinan

a. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Fasakh disebabkan oleh dua hal:

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut, ialah:¹⁶

1) *Syiqaq*(شِقَاق)

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁷

2) Adanya cacat

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

¹⁶Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", edisi I cet-I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 244.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm 84.

3) Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

4) Suami gaib

Maksud gaib tersebut adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui perginya dan keberadaannya dalam waktu yang lama.

5) Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan sebelum akad nikah

suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Kumala, dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni sangat sesuai dengan hukum yang berlaku, baik Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan melihat bukti-bukti, mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasan-alasan hukum. Hakim

juga menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (1) yakni *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”*¹⁸ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang disusun oleh Kumala dengan penulis ialah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga membahas Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Indonesia mengenai permasalahan pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa perkara pembatalan perkawinan yang di teliti oleh Kumala merupakan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan pembatalan perkawinan yang akan diteliti oleh penulis ialah pembatalan poligami karena tanpa adanya izin dari istri pertama.

Skripsi yang disusun oleh Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul *“PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)”*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala

¹⁸Kumala, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2011. hlm. 69.

sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.¹⁹ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Wahyuni dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam serta sama-sama dalam permohonan perkara tersebut Hakim memberikan putusan perkawinan yang telah terjadi dibatalkan demi hukum. Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Wahyuni berfokus pada proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang dianalisa berdasarkan latar belakang permasalahannya, orang yang berhak mengajukan perkara pembatalan perkawinan, dan juga orang yang berhak memberikan putusan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan yang diteliti oleh penulis berfokus pada akibat yang ditimbulkan setelah adanya putusan pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama.

¹⁹Wahyuni Fatimah Ashari, "Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. 2013. hlm. 62.

Skripsi yang disusun oleh Enggar Puji Astuti, dengan judul “PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. *Pertama*, perkawinan sejenis yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang wanita, hal ini menyimpang dari ajaran Agama Islam dan tidak ada aturan dalam peraturan yang berlaku. *Kedua*, dengan memalsukan identitas salah satu pihak. Hal tersebut sudah jelas menyimpang dari peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.²⁰ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Enggar dengan skripsi penulis ialah keduanya menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dimana putusan tersebut membatalkan perkawinan yang terjadi. Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Enggar merupakan pembatalan perkawinan sesama jenis. Sedangkan skripsi yang

²⁰Enggar Puji Astuti, “Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Surakarta. 2019. hlm. 17.

disusun oleh penulis merupakan pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian literer, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.²¹

2. Sumber Data

Penelitian dengan jenis literer dan metode pendekatan normatif ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum²², diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dan dapat terdiri dari: norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang

²¹Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet. ke- IV, (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hlm. 125.

²²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, hlm. 51.

hingga kini masih berlaku.²³ Dan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam Penulisan ini ialah Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor Perkara 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt mengenai putusan pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴ Sehingga dalam Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil Penulisan (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁵

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

²⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian...*, hlm. 77.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan Penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema Penulisan, baik berupa karya ilmiah, buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan lainnya.²⁶

Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi putusan pengadilan agama dengan Nomor :1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt yang berhubungan dengan Penulisan. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan.. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt. Penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun Penulisan ini.

b. Wawancara

²⁶Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun Penulis terhadap narasumber atau sumber data. Penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta jawaban, menulis jawaban responden, dan mengadakan proding (menggali keterangan yang lebih mendalam).²⁷ Wawancara dengan responden tersebut dilakukan secara individual dengan mewawancarai Hakim yustisial di Pengadilan Agama Klaten yang memutus perkara ini yaitu Ibu Dra.Hj. Ismiyati S,H . Teknik wawancara ini digunakan untuk mendukung data dokumen terkait dengan putusan Pengadilan Agama Nomor: 1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Teknis analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah analisis normatif. Karena Penulisan ini melihat dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan analisis wacana, ialah cara atau metode untuk mengkaji wacana yang ada

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 115.

atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik itu secara tekstual ataupun juga kontekstual.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Bab I, berupa pendahuluan. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang dijadikan acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi Penulisan yang cakupannya terdiri dari latar belakang masalah, yang memuat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut. Kemudian rumusan masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan Penulisan, manfaat Penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode Penulisan, dan sistematika Penulisan.

Bab II, berupa landasan teori. Pada bab ini membahas tentang perkawinan yang terdiri dari tujuan perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Kemudian membahas tentang poligami yang terdiri dari, dasar hukum poligami, prosedur poligami, dan hikmah poligami. Selanjutnya membahas tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari, dasar hukum pembatalan perkawinan, dan penyebab pembatalan perkawinan.

Bab III, berupa penyajian data. Pada bab ini dijelaskan Sejarah Pengadilan Agama Klaten, Letak Geografis, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten, dan Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten, Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama Klaten. Kemudian berisi

²⁸ *Ibid*, hlm. 116.

tentang deskripsi Perkara Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt).

Bab IV, berupa analisis dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dan menganalisis mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan poligami karena tanpa izin istri pertama dengan Nomor perkara 1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt.

Bab V, berupa penutup. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang telah diperoleh penulis dari analisa pembahasan masalah yang diteliti dan berupa saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, POLIGAMI, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hlm. 136.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.⁵

Sedangkan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, ...hlm. 14.

⁶Kompilasi Hukum Islam BAB I, Pasal 3.

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang-orang yang mempunyai kemauan untuk menikah tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap wanita dan ia mampu untuk menikah.
- b. Sunnah, terhadap orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.
- c. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah. Akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri (pendorong dan penghambat untuk kawin itu sama).
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup untuk menahan diri sehingga tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga

sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya.⁷

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam rukun dan syarat sahnya akad nikah dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Mempunyai hak perwalian;
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara), Cetakan ke 4, 2014, hlm. 43-47.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang saksi;
- 2) Hadir dalam Ijab Qabul;
- 3) Dapat mengerti maksud akad;
- 4) Islam;
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij;
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁸

5. Hikmah Perkawinan

Secara detail adapun beberapa hikmah perkawinan ialah:

- a. Sebagai fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar'i;

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, ... hlm. 55.

- b. Upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat akibat penyaluran hawa nafsu yang tidak benar seperti zina;
- c. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram;
- d. Membuat ritme kehidupan seseorang menjadi lebih tertub, teratur, dan mengembangkan sikap kemandirian, serta tanggung jawab;
- e. Pernikahan dan keturunan akan mendatangkan rezeki;
- f. Nikah mempunyai kontribusi di dalam membentuk pribadi untuk berperilaku disiplin seperti disiplin dalam membagi waktu dan pekerjaan;
- g. Memperkokoh tali persaudaraan antara masyarakat;
- h. Menghasilkan keturunan yang baik, jelas nasabnya dan semakin merekatkan hubungan antar sesama;
- i. Dalam salah satu laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimuat dalam Koran al-Sya'b pada hari Sabtu , 1 Juni 1959, melaporkan bahwa pasangan suami istri akan bertahan hidup lebih lama jika dibandingkan dengan yang bukan pasangan suami istri.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila

⁹Asroru Ni'am Sholeh , *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 42-44.

pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹⁰

Dalam Hukum Islam yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.¹¹

Pengertian tersebut sesuai dengan KHI yang tertuang dalam Pasal 55 Ayat (1), yaitu: “Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.”¹²

2. Dasar Hukum Pengaturan Poligami

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

¹⁰Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15.

¹¹*Ibid*, hlm.16.

¹²Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55 Ayat (1)

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

Sedangkan dalam beberapa landasan hukum pengaturan hukum pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Selain itu, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam. Dari Beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu begitu pula sebaliknya. Tetapi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 71.

pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.¹⁴

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yakni “Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”.¹⁵

3. Syarat-Syarat Poligami

Seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

¹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

¹⁵*Ibid*, BAB I Pasal 4

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁶

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹⁷

¹⁶*Ibid*, BAB I Pasal 4

¹⁷Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55

4. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BabVIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB IX., Pasal 56

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB IX., Pasal 57

5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul;
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dan perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.²¹ Dengan demikian, secara umum

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Fiqh Sunnah*, Juz III Cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 358.

²¹Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 195.

batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan.

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.²² Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²³

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang menjadi sebab suatu perkawinan dianggap batal telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71,²⁴ sebagai berikut :

Pasal 70, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 242

²⁴Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 70 dan Pasal 71

- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika dikaitkan dengan pengertian pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan pokok adanya pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan memtalakan kelangsungan perkawinan, seperti berikut:²⁵

- a. Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami;
 - 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain walinya, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan suami istri maka disebut *fasakh baligh*.

²⁵Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 196.

- b. Batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - 1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan;
 - 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istrinya adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:²⁶

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah

²⁶Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 72

itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kemudian dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:²⁷

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:²⁸

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74

BAB III

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERKARA NOMOR
1968/PDT.G/2016/PA.KLT)**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten

1. Lahirnya Pengadilan Agama Klaten

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya yang diatur dalam Pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan Undang-undang ini Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung, ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung.
- b. Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mahkamah agung.
- c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah militer tinggi, mahkamah agung.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung.¹

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten yang beralamat Jl. K.H. Samanhudi No.9 Klaten, Jawa Tengah Telp/Fax: (0272) – 321513/(0272) – 321513 ext 12 Email: admin@pa-klaten.go.id/pa_klaten@yahoo.co.id website : pa-klaten.go.id

Wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten terdiri dari 26 Kecamatan dan 401 Desa/Kelurahan. Secara Geografis Pengadilan Agama Klaten berbatasan sebagai berikut:²

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Sebelah Timur | :Kabupaten Sukoharjo |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Gunung Kidul |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Sleman |

¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

²Habibah Sahara, “*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq*” Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2009, hlm. 43-44.

| | |
|---------------|----------------------|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Boyolali |
|---------------|----------------------|

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten

| JABATAN | NAMA |
|------------------------|--|
| 1. Ketua | Dra. Nurwathon, SH, M,H. |
| 2. Wakil Ketua | Drs. H. Tubagus Masrur, S,H. |
| 3. Hakim | a. Drs. Ahmad Wahib, SH b. Dra. Hj. Ismiyati, SH. c. Dra. Sri Sangadatun, MH. |
| 4. Sekretaris | Wardoyo Dwi Astoto, SE. |
| 5. Panitera | Dra. Aziz Nur Eva |
| 6. Wakil Panitera | Uswatun Chasanah, SH. |
| 7. Panmud Hukum | Siti Suharti, S.Ag. |
| 8. Panmud Gugatan | Widodo, SH. |
| 9. Panmud Permohonan | Isti Wajinah, SH. |
| 10. Panitera Pengganti | a. Nur Hayati, SH b. Salman Cholidah, SH. c. Tiara Melda Azmila, SH. d. Leny Legawati |

| | |
|---|---|
| | e. Ni'matul Ulfah, SH,I. |
| 11. Jurusita | a. Jumeno, SH b. Nanang Wahyudi, A.Md. c. Desi Retno Utari, A.Md d. Marino e. Warsana |
| 12. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan | Chartiko Setia Utomo, S,Sos, SH. |
| 13. Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tataksana | Ismail Jamil |
| 14. Kasubag Umum dan Keuangan | Sri Supini |
| 15. Staf Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sigit Purnomo, S.Kom |
| 16. Staf Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tataksana | Dyah Triningsih, S.E. |
| 17. Staf Kasubag Umum dan | Vollodia Lesta Zahwa, S.Psi. ³ |

³Layanan Informasi Pengadilan Agama Klaten

| | |
|----------|--|
| Keuangan | |
|----------|--|

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten

Visi Pengadilan Agama Klaten

“mewujudkan badan peradilan yang agung di lingkungan peradilan agama klaten”.

Misi Pengadilan Agama Klaten

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga dan pengelolaan keuangan;
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan⁴

5. Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama Klaten

Prosedur pengajuan Permohonan Pembatalan poligami di Pengadilan Agama Klaten ialah sama denga prosedur pengajuan permohonan yang lain,⁵ yakni dengan cara sebagai berikut:⁶

⁴Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Klaten, *Online*, <http://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020 pukul 09.08 WIB.

⁵Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
- b. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
- c. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggung jawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- d. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna diajukan uji konsekuensi.
- e. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
- f. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak.
- g. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya

⁶Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Klaten, *Online*, <http://www.pa-klaten.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/prosedur-permohonan-informasi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 09.20 WIB.

penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.

- h. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- i. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
- j. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
- k. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
- l. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon

sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

- m. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
- n. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13 dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
- o. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)

1. Duduk Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt merupakan perkara permohonan pembatalan poligami tanpa izin istri pertama yang diajukan oleh Pemohon (istri sah) , umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Mranggen

Rt.003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon (suami), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honor pada Kantor UPTD Pendidikan, Kecamatan Manisrenggo, tempat tinggal Mranggen, Rt.003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan Turut Termohon I (wanita lain), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Desa Watuadeg, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten . permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan pada tanggal 19 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah. pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat Mranggen Rt003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah

melakukan hubungan suami-istri dan telah dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 08 Februari 2007.⁷

Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup lama yang dapat dikatakan harmonis, rukun dan baik. Namun pada akhirnya Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon telah melakukan pernikahan lagi dengan Turut Termohon I tanpa pengetahuan dan tanpa adanya izin dari Pemohon. Dalam pernikahan antara Termohon dan Turut Termohon I, Termohon telah melakukan pemalsuan identitasnya dengan mengaku berstatus bujang dan telah memalsukan Kartu Tanda Penduduknya dengan status sebagai perjaka. Pernikahan tersebut telah dilakukan di KUA Sei Bedug dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 pada tanggal 26 September 2016. Yang faktanya bahwa sebenarnya Termohon berstatus telah beristri yakni Pemohon.⁸

Karena adanya pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I tanpa adanya izin dari Pemohon, maka Pemohon merasa dirugikan dan telah dibohongi oleh Termohon yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan poligami suaminya (Termohon) dengan wanita lain (Turut Termohon I) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Hakim untuk segera memeriksa dan

⁷Salinan Penetapan Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

⁸*Ibid.*

mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan pernikahan suaminya (Termohon) dengan wanita lain (Turut Termohon I).

2. Pertimbangan dalam Pokok Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Berdasarkan duduk perkara ataupun permohonan Pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan dan juga berdasarkan keterangan Pemohon ataupun Termohon saat di Persidangan, maka Hakim memutuskan permohonan pembatalan poligami dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:⁹

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai istri Termohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I, dengan alasan bahwa pernikahan Termohon dan Turut Termohon I telah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku karena Termohon ternyata masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi.

Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Termohon yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/III/2006 tanggal 26 Maret 2006. Oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon dan Turut

⁹Salinan Penetapan Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Termohon I sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon melakukan perkawinan poligaminya dengan Turut Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon yang berarti melakukan perkawinan poligaminya tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon memang melakukan perkawinan dengan Turut Termohon I yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam. Dalam pernikahan tersebut, Termohon melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memalsukan identitas sebagai perjaka. Hakim juga menilai KUA Kecamatan Sei Bedug sebagai Turut Termohon II telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristri dengan wanita lain. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pernikahan yang dilakukan dinilai tidak sah, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus dan mengabulkan terhadap permohonan pembatalan poligami tersebut pada dasarnya juga memperhatikan dari sisi Hukum Islam. Hakim

menggunakan Hadits yaitu dalam Kitab Al-Birr Was Sillah Wal Adab. Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan untuk senantiasa jujur dalam segala ucapan maupun perbuatan.¹⁰ Terbukti Termohon telah melanggar syariat Islam dalam melangsungkan poligaminya tidak jujur karena telah memalsukan identitasnya sebagai perjaka dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan pada perkara ini, Hakim melihat apabila perkawinan poligami terus dilanjutkan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya. Perkawinan poligami dibatalkan adalah tindakan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan.¹¹

Dari fakta diatas pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan merujuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai permohonan pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I dapat dikabulkan.

Oleh karena pernikahan Termohon I dengan Turut Termohon I dapat dibatalkan, maka kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Bedug, Batam harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Hakim memerintahkan Turut

¹⁰Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

¹¹*Ibid.*

Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut.¹²

3. Penetapan Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim yang menangani perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016;
- c. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Memerintahkan Turut Termohon II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini.¹³

¹²Salinan Penetapan Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

¹³Salinan Penetapan Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

C. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas proses pembatalan perkawinan karena tanpa izin istri pertama. Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan. Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan.

Pada saat perkara tersebut masuk dalam Pengadilan Agama Klaten, perkara tersebut kemudian diterima oleh Pengadilan Agama Klaten yang nantinya akan diproses. Hakim sebelum mengadili dan memutus perkara tersebut, Hakim menerima perkara pembatalan poligami tanpa izin istri pertama Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt mengupayakan mediasi antara pihak yang berperkara. Namun dalam upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, Hakim kemudian mengadili serta memutuskan perkara tersebut sesuai prosedur yang ada di Pengadilan Agama Klaten . Dengan melihat duduk perkara antara Pemohon dan Termohon serta telah melihat bukti-bukti yang ada, permohonan Pemohon untuk membatalkan

perkawinan poligami suaminya (Termohon) dengan wanita lain dapat batal demi hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan baik dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam.¹⁴

¹⁴Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Perkara pengajuan permohonan pembatalan poligami tanpa izin istri pertama dengan Nomor Perkara 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. merupakan salah satu perkara yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten karena dalam perkawinan poligaminya telah melanggar beberapa aturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam perkawinan poligaminya sudah terlihat jelas dalam salinan putusan tersebut serta pernyataan pada saat wawancara penulis dengan Hakim yang memutus perkara tersebut.

Dalam Perkawinan Termohon dengan wanita lain (Turut Termohon I) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 20, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Serta melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹ Agar mudah dipahami, penulis akan memperjelasnya sebagai berikut:

Termohon melakukan pernikahan keduanya (poligami) dengan Turut Termohon I telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan karena tanpa adanya izin dari Pemohon (istri sah) yang tidak lain merupakan pihak yang dikehendaki oleh Pengadilan dalam memberikan izin apabila Termohon akan beristri lebih dari satu. Dalam melangsungkan perkawinan poligaminya dengan wanita lain Termohon tidak mengajukan permohonan poligaminya kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut juga diperkuat dengan Termohon yang tidak dapat membuktikan adanya izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Ibu Sumiyati menambahkan bahwa Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal tersebut salah satunya adalah Termohon tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon selaku istri sahnya. Diperkuat dengan keterangan Pemohon saat dipersidangan bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah melakukan perkawinan poligami.²

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam melangsungkan perkawinan poligaminya dengan Turut Termohon I telah terbukti bahwa Termohon memalsukan identitasnya sebagai perjaka. Faktanya Termohon

¹Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

²*Ibid.*

berstatus sudah beristri dengan dibuktikan adanya kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 antara Pemohon dengan Termohon. Dalam hal tersebut Turut Termohon II sebagai KUA Kecamatan Sei Bedug telah lalai dalam menjalankan tugasnya yang telah menikahkan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan wanita lain karena tidak sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Termohon yang telah memalsukan identitasnya agar pernikahannya dengan Turut Termohon I (wanita lain) dapat berlangsung dan tercatat di KUA Kecamatan Sei Bedug pada akhirnya mendapatkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Turut Termohon II (KUA Sei Bedug, Batam) terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang mana syarat-syarat perkawinan daripada Termohon tidak terpenuhi sebab adanya pemalsuan identitas tersebut sehingga terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Terlepas dari akibat kelalaian Turut Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya dengan Turut Termohon I, yang jelas pernikahan tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta diatas menjadi bukti bahwa pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I dapat dibatalkan mengingat juga pernikahan yang terjadi telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan dan mengabulkan terhadap permohonan pembatalan poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya juga memperhatikan dari sisi hukum Islam. Bahwa Hakim juga menggunakan Hadits sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini, yaitu dalam Kitab Al-Birr Was Sillah Wal Adab³:

Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada neraka. Jika

³Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no.2607)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan, insan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir dituntut untuk senantiasa jujur dalam segala ucapan maupun perbuatan. Salah satunya ialah Poligami yang merupakan suatu perbuatan sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan beliau sendiri yang mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur.

Dalam hadits tersebut sangat jelas Termohon telah melanggar aturan syari’at Islam karena tidak jujur dalam melakukan perkawinan poligaminya tanpa izin dari istri pertama dan dengan memalsukan identitasnya.

Selain berpedoman pada Hadits tersebut, Hakim juga mempertimbangkan adanya kemaslahatan pada perkara ini. Sesungguhnya dalam berpoligami terdapat beberapa kemanfaatan, namun apabila poligami yang dilakukan tidak mengikuti prosedur yang ada dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam maka menjadikan poligami yang demikian itu banyak menimbulkan dampak negatif. Maka, dalam perkara ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan poligami yang terjadi antara Termohon dan Turut Termohon I melihat apabila perkawinannya terus dilanjutkan akan berdampak negatif pada pihak yang bersangkutan dan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui membatalkan perkawinan poligami antara

Termohon dengan Turut Termohon I adalah tindakan yang lebih baik. Dan merupakan maslahat bagi pihak yang bersangkutan daripada tetap mempertahankan perkawinan poligaminya.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami antara Termohon dan Turut Termohon I yang permohonannya diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Klaten dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan baik dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam.

Melihat juga Hakim dalam menerima, mengadili, serta memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama Klaten. Serta upaya mediasi yang dilakukan Hakim terhadap pihak yang berperkara namun tidak berhasil.⁵ Sehingga tindakan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan putusan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Termohon sangat tepat dan telah sesuai ketentuan yang ada.

B. Akibat Hukum Pembatalan Poligami pada Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan poligami merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

⁴Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

⁵*Ibid.*

menentukan bahwa: *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilaksanakan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai akibat hukum terhadap putusan pembatalan poligami Pengadilan Agama khususnya perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt mencakup beberapa hal, antara lain adalah:

1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami terhadap hubungan suami istri yang terjadi pada Termohon dan Turut Termohon I ialah putusanya hubungan antara suami istri tersebut. Karena setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut telah batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”*

2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak

Pada perkawinan yang terjadi antara Termohon dengan Turut Termohon I telah dikarunia seorang anak. Sehingga akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah. Maka anak tersebut berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa *“Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”*.

Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *“Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila*

pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.”

Yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku. Walaupun perkawinannya tidak sah maka diberi pengecualian, dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yaitu tetap ada pembagian harta bersama antara suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan.

Namun dalam perkara ini, mengingat Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinannya dengan Turut Termohon I yang artinya dalam perkawinan tersebut salah satu pihak tidak ada itikad baik sebelumnya maka tidak ada pembagian harta bersama terhadap pihak yang tidak beritikad baik.

4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap orang ketiga dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”* Atau dalam Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka*

memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap.”

Hal ini disimpulkan bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan poligami tetap berlaku. Dan ini harus tetap dilaksanakan suami istri tersebut sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak merasa dirugikan. Misalnya masalah hutang piutang dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian diatas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt adalah:

Bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh Termohon dengan Turut Termohon I dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon (istri) dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama Klaten. serta Termohon dalam melangsungkan poligaminya telah memalsukan identitas sebagai perjaka. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan dari Pemohon serta Termohon dan bukti KTP dari Termohon saat di Persidangan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt adalah:

Dalam Perkawinan Termohon dengan wanita lain (Turut Termohon I) telah terbukti melanggar ketentuan, antara lain:

- 1) Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam, yaitu Termohon dalam perkawinan poligaminya tanpa adanya izin dari Pemohon dan tidak mengajukan permohonan poligaminya ke Pengadilan Agama.

- 2) Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan poligami Termohon tetap dilangsungkan oleh Turut Termohon II (KUA Kecamatan Sei Bedug) mengingat Termohon sudah beristri.
- 3) Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebab adanya pemalsuan identitas sehingga terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selain peraturan perundang-undangan, Hakim dalam memutus perkara juga merujuk pada, antara lain:

- a. Hakim merujuk pada Hukum Islam, yaitu yang apabila Termohon hendak berpoligami harus ada kejujuran dalam melangsungkan perkawinan poligaminya. Termohon tidak diperbolehkan melangsungkan poligaminya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri dan juga memalsukan identitasnya.
- b. Hakim merujuk pada kaidah fiqiyah, yaitu Hakim mempertimbangkan kemaslahatan yang apabila perkawinan poligami tersebut tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat Hukum dari pembatalan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon I adalah:

- a. Terhadap Hubungan Suami Istri, putusnya hubungan suami istri antara Termohon dan Turut Termohon I. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi.
- b. Terhadap Kedudukan Anak, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap anak sah. Maka anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Turut Termohon I berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.
- c. Terhadap Harta Bersama, pihak yang tidak mempunyai itikad baik maka pihak tersebut tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam perkawinannya dengan wanita lain maka Termohon tidak mendapatkan pembagian harta bersama.
- d. Terhadap Pihak Ketiga, pihak ketiga yang beritikad baik tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut.

B. Saran

Setelah melakukan Penulisan ini, Penulis memberikan saran diantaranya:

1. Bagi masyarakat, masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim khususnya apabila hendak melangsungkan perkawinan

poligaminya haruslah sesuai dengan aturan hukum yang semestinya yang berlaku di Indonesia. Sehingga akan tercipta ketertiban hukum dan tidak adanya pihak-pihak yang akan dirugikan nantinya.

2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA, dalam melaksanakan tugasnya sebaiknya lebih teliti lagi dan memperhatikan berkas-berkas yang telah ada apabila hendak menikahkan seseorang. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan poligami.
3. Bagi lembaga Peradilan Agama, sebaiknya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara khususnya perkara dalam Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt baik pertimbangan hukum secara yuridis maupun non yuridis lebih baik dicantumkan seluruhnya dalam putusan agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashari, Wahyuni Fatimah, “Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. 2013.
- Astuti, Enggar Puji, “Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Muna Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cetakan ke 4, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, Jakarta: Kecana, 2010.
- Hadiputra, Alfian, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Undip Semarang, Semarang, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ilyas, “Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kumala, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2011.

Layanan Informasi Pengadilan Agama Klaten

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam*, cet IV, Jakarta: Grafind Persada, 2001.

Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Klaten, Online, <http://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Ridwan, Muhammad Saleh, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, ed. Muslimin Kara, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Figih Sunnah*, Juz III Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Sahara, Habibah, "*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten No.786/Pdt. G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq*" *Skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2009.

Sholeh, Asroru Ni'am, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: eLSAS, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Somieyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty, 2006.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Edisi I Cetakan Pertama, 2006.

Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

JADWAL PENELITIAN

[illegible]

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PENGADILAN AGAMA KLATEN



PENGADILAN AGAMA KELAS IB KLATEN
Jalan KH. Samanhudi No. 09 Telp. (0272) 321513, Fax. (0272) 321 513
KLATEN
Website : www.pa-klaten.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A24/1224/Hm.00/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Klaten,
menerangkan bahwa:

Nama : Arum Sari Puspa dewi
Nim : 152121091
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Surakarta

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten
dengan Judul Penelitian:

**"PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (Studi Putusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.



Klaten, 06 Mei 2020

Panitera

Drs. Aziz Nur Eva

LAMPIRAN 3

FOTO PENELITIAN DENGAN IBU DRA.HJ. ISMIYATI, S,H. SELAKU HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN





LAMPIRAN 4

HASIL WAWANCARA DENGAN IBU DRA. HJ. ISMIYATI, S,H. SELAKU HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan narasumber Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Dra. Hj. Ismiyati, S,H. mengenai Penelitian penulis yang berjudul *“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten?

Prosedur pengajuan permohonan perkara pembatalan perkawinan sama halnya dengan mengajukan permohonan lainnya. Baik pengajuan permohonan perceraian ataupun pengajuan permohonan dispensasi nikah. Sama saja tidak ada bedanya.

2. Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt apa yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonan perkawinan antara suaminya (Termohon) dengan wanita lain (Turut Termohon I)?

Alasan utama Pemohon pada waktu di persidangan adalah Termohon melakukan perkawinan poligaminya tidak diketahui oleh Pemohon yang mana tidak mendapatkan izin dari Pemohon. Dalam perkara ini sudah jelas

bahwa Termohon telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Apakah Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada? Dan apakah ada upaya mediasi dalam perkara tersebut?

Setiap perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Klaten dipastikan sudah sesuai prosedur yang ada. Majelis Hakim juga telah mengupayakan adanya mediasi dalam perkara tersebut yang telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam upaya mediasi, Pemohon tetap ingin melanjutkan persidangannya hingga selesai.

4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt?

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt sudah jelas tercantum dalam putusan bahwa Termohon melanggar beberapa ketentuan yang ada yaitu Pasal 3, 4, 20, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Serta melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

5. Adakah dasar pertimbangan majelis hakim lainnya yang tidak tercantum dalam putusan tersebut seperti dasar pertimbangan non yuridis? Jika ada, mengapa tidak dicantumkan dalam putusan?

Ada, seperti dasar Hadits yaitu dalam Kitab Al-Birr Was Sillah Wal

Adab:

Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no.2607).

Kemudian dasar kemaslahatan. Menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon I adalah tindakan yang lebih baik. Dan merupakan maslahat bagi pihak yang bersangkutan daripada tetap mempertahankan perkawinan poligaminya akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar.

Kedua dasar non yuridis tersebut tidak disertakan dalam putusan karena majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt lebih mengutamakan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kalaupun ada dasar pertimbangan secara non yuridis itu hanya sebagai penguat saja. Dan dalam perkara tersebut sudah jelas dan dirasa sudah cukup berkekuatan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait perkawinan poligaminya dengan Turut Termohon I.

6. Bagaimana majelis hakim membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon memang sesuai fakta yang telah ada?

Pembuktiannya berdasarkan keterangan dari Pemohon ataupun Termohon itu sendiri saat dalam persidangan serta melihat beberapa bukti yang telah ada yang sudah tercantum dalam putusan.

LAMPIRAN 5

SALINAN PUTUSAN NOMOR 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt



PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah antara:

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Mranggen Rt.003/002, Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi I;

Melawan

1. Termohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honor pada Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Manisrenggo, tempat tinggal Mranggen Rt.003/002, Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten sebagai Termohon I/ Tergugat Rekonvensi II;
2. Termohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Desa Watuadeg, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017, memberikan kuasa kepada Alun Bayu Krisna, S.H., MH. dan Riyatno Tazri, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Alun Bayu Krisna, S.H., MH. & Rekan, yang beralamat di Padukuhan daleman, No. 11 Rt.3/22, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 07/KH/2017/PA.Klt. tanggal 25 Januari 2017, sebagai Turut Termohon I/Penggugat Rekonvensi;
3. KUA Kecamatan Sei Bedug, Kecamatan Sei Bedug, Kabupaten Batam, Kepulauan Riau sebagai Turut Termohon II;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar Para Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register perkara nomor : 1968/Pdt.G/2016/PAKit., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sampai sekarang, sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Alim lahir tanggal 08-02-2007 ;
3. Bahwa Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah menikah dengan Turut Termohon I dan telah melakukan pemalsuan dengan mengaku berstatus bujang dan telah menikah di KUA Sei Bedug (Turut Termohon II) dan dicatat di KUA Sei Bedug dengan nomor 0456/060/IX/2016 pada tanggal 26 September 2016;
4. Bahwa Termohon sebenarnya adalah berstatus beristeri yakni Pemohon (Dwi Ningsih binti Sutardi Hadi Sumarto);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal pernikahan antara Termohon (Agus Winarno bin Darmana) terhadap Turut Termohon I (Riska Wijayanti binti Yana Udin Sapuan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon dan kuasa Turut Termohon I telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya itu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, dan Turut Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA KLATEN TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa berdasarkan pasal 17 BW/KUHP Perdata dan pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*), dan apabila mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan;
2. Bahwa dalam Kasus ini alamat Turut Tergugat I adalah di Watuadeg, Plupuh, RT 01 RW 029, Wukirsari, Cangkringan, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan bukti TT.1 berupa KTP Nomor 3404174409860002, (bukti terlampir) sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan yang ada dan didukung bukti yang kami lampirkan maka kompetensi relatif pengadilan yang berwenang dalam kasus ini adalah masuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Agama Sleman, sehingga sudah sepatutnya Gugatan/Permohonan dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ***niet ontvankelijke verklaard (N.O)***;



3. Bahwa Perkawinan antara Turut Termohon I dan Termohon di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau, seharusnya bila melihat

ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 23 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa Pembatalan Perkawinan di ajukan pada Pengadilan di mana Perkawinan tersebut berlangsung atau kediaman istri, maka jelas disini kediaman sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Agama Batam;

**GUGATAN TIDAK DI DASARKAN PADA ALAS HAK YANG CUKUP
(Persona Standi Jidicio) :**

4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya tertanggal 19 Desember 2016, bahwa adalah permohonan Pembatalan Nikah, semestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permohonan Tersebut adalah masuk dalam ranah Gugatan Voluntair yang salah satu ketentuannya adalah tidak perlu adanya Pihak lain yang di gugat atau di jadikan termohon, sehingga sudah seharusnya Termohon tidak perlu memasukan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dalam permohonan karena hal tersebut tidak ada dalam ketentuan terkait Gugatan Voluntair/Permohonan. sehingga dalam kasus ini kapasitas dan kapabilitas dan penyebutan istilah Turut Termohon I maupun Turut Termohon II menjadi tidak jelas atau *Obscuur Libelle*;



5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tertanggal 19 desember 2016 tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan/permohonan, serta tidak pula memenuhi syarat umum suatu gugatan/permohonan, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 No. 3 Rv yang menyatakan :

- 5.1. Memuat Tanggal gugatan/permohonan tersebut dibuat
- 5.2. Alamat Kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum gugatan tersebut semestinya diajukan
- 5.3. Titel Gugatan yang semestinya memenuhi syarat sebagaimana berikut :
 - a. Dibuat secara singkat jelas, dan sinkron dengan isi atau materi Gugatan/Permohonan
 - b. Menggunakan bahasa hukum sesuai ketentuan
 - c. Menggambarkan Isi Gugatan
- 5.4. Identitas para pihak (status Persona)
- 5.5. Posita/Fundamentum Petendi
- 5.6. Petitum (tuntutan Penggugat/Pemohon)
- 5.7. Nama Penggugat/Pemohon atau kuasa hukumnya jika ada serta tanda tangannya

Bahwa dalam Permohonan ini kami berpendapat jika Permohonan Pemohon ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Poin 5.2, 5.3, 5.5, dan 5.6, di karenakan dalam Permohonan Pemohon tidak mengajukan pada Pengadilan yang berwenang, Gugatan tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak ada sinkronisasi atau hubungan antara Posita dan Petitum;

GUGATAN PEMOHON KABUR (Obscuur Libelle)

6. Bahwa Posita/Fundamentum Petendi dari Pemohon tidak memuat bagian yang menguraikan Peristiwa atau kejadian perkaranya, dan tidak memuat bagian yang menguraikan tentang hukumnya, serta antara Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum (tuntutan

Hal. 5 dari hal. 22

Putusan No. 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt

Pemohon) tidak sinkron serta tidak memenuhi syarat Formi Gugatan/Permohonan karena :



- 6.1. Posita Fundamentum Petendi dari Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrood*) dan kejadian yang mendasari Gugatan;
- 6.2. Tidak jelas Obyek yang disengketakan yaitu :
 - a. Permohonan tidak jelas apakah Permohonan atau Gugatan karena isi dari Posita justru mengarah ke Gugatan;
 - b. Tidak ditemukan adanya Obyek sengketa/Pangkal masalah yang jelas (sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1975);
- 6.3. Pengabungan Gugatan yang campur aduk (sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi MA No. No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986);
- 6.4. Petitum tidak Terperinci tetapi hanya berupa kompositur atau *exaquo et bono*;
7. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, oleh karenanya agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Sela dengan Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang memeriksa perkara ini;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selanjutnya kami mohon Jawaban Dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi diatas;
2. Bahwa **Turut Termohon I** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Turut Termohon I** ;



3. Bahwa tidak adanya Hubungan hukum sama sekali antara Pemohon dengan **Turut Termohon I** sehingga dalam perkara ini **Turut Termohon I** hanyalah memiliki hubungan hukum dengan Termohon sebagaimana dalam surat nikah nomor 0456/060/IX/206 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 26 September 2016;
4. Bahwa benar sebelum menikah dengan Turut Termohon I, Termohon telah menikah terlebih dahulu dengan Pemohon pada tanggal 25 Maret 2006, hingga pada saat setelah perkawinan baru di ketahui bahwa termohon belum bercerai dan masih tinggal serumah dengan Pemohon di : Mranggen RT 003 RW 002, Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Hal tersebut telah di perkuat dengan adanya pengakuan dari Termohon pada persidangan tertanggal 22 Maret 2017 yang lalu;
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 dikarenakan adanya bujuk rayu dan serangkaian tipu muslihat serta dan janji-janji, Turut Termohon I bersedia menikah dengan Termohon dikarenakan pada saat itu Turut Termohon I telah mengandung anak dari hasil hubungan badan/ba'da dhuhul antara Turut Termohon I dengan Termohon, hal tersebut juga telah diakui sendiri oleh Sdr.Agus Winarno bin Darmana atau Termohon pada persidangan tertanggal 22 Maret 2017 yang lalu ;
6. Bahwa Pernikahan sebagaimana posita ke-4 diatas adalah atas inisiatif dari Termohon dengan melakukan pernikahan di Pulau Batam tanpa dokumen yang benar sesuai prosedur yang berlaku dan hal tersebut benar-benar atas rencana dari Termohon karena dirinya mengaku masih dalam proses perceraian dengan Istrinya atau Pemohon dan belum memiliki surat akta cerai dengan Pemohon hal tersebut juga telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh Sdr.Agus Winarno bin Darmana atau Termohon pada persidangan



tertanggal 22 Maret 2017 yang lalu;

C. DALAM REKONVENSI

7. Bahwa untuk selanjutnya kami mohon Rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok Perkara diatas;
8. Bahwa untuk selanjutnya kami mohon pula Turut Termohon I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I serta Termohon dalam Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi II atau dapat pula disebut Para Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa pada mulanya Penggugat Rekonvensi mengenal Tergugat Rekonvensi II pada tahun 2012 karena yang bersangkutan merupakan kawan dekat mantan kekasih Penggugat Rekonvensi yang pada waktu itu hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan kekasihnya tengah renggang dan bermasalah sehingga Tergugat Rekonvensi II menjadi penengah dan teman curhat Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa pada akhirnya tak lama kemudian Tergugat Rekonvensi II menjadi gencar mendekati Penggugat Rekonvensi dan merayu Penggugat Rekonvensi agar mau menerima cintanya dan menjadi kekasih dari Tergugat Rekonvensi II, namun Penggugat Rekonvensi menolak dikarenakan status Tergugat Rekonvensi yang masih Suami sah dari Tergugat Rekonvensi I, namun Tergugat Rekonvensi II meyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi II telah lama pisah ranjang dan tengah menjalani Proses perceraian dengan Tergugat Rekonvensi I dan telah mencapai tahap akhir yakni tahap putusan akhir serta ikrar talak:



11. Bahwa Tergugat Rekonvensi II sering mengancam Penggugat Rekonvensi jika menolak cintanya maka Tergugat Rekonvensi II akan bunuh diri, bahkan beberapa kali pernah menunjukkan upaya bunuh dirinya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, akhirnya karena ketakutan dan merasa iba dengan Tergugat Rekonvensi II maka pada akhirnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II berpacaran dan terjadilah hubungan hubungan badan hingga Penggugat Rekonvensi hamil;
12. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut pertanggung jawaban dari Tergugat Rekonvensi II untuk menikahinya dan kemudian Tergugat Rekonvensi II menyetujui dan mengajak Penggugat Rekonvensi II menikah di Kecamatan Sei Beduk, kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan merekayasa seluruh surat pengantar dan persyaratan nikahnya karena status perceraianya Tergugat Rekonvensi II dengan Tergugat Rekonvensi I belum selesai sehingga statusnya Tergugat Rekonvensi II tidak memungkinkan untuk menikah lagi hal ini juga sejalan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi II pada persidangan tanggal 22 April 2017 yang lalu;
13. Bahwa Ketika perjalanan ke Pulau Batam guna keperluan menikah tersebut barulah Tergugat Rekonvensi II mengaku kepada Penggugat Rekonvensi bahwa sebenarnya dirinya belum bercerai dan belum mendaftarkan perceraianya dengan Tergugat Rekonvensi I, namun nasi sudah menjadi bubur malang tak dapat di elak, semua telah terlanjur terjadi dan pernikahan pun tetap di langungkan ;
14. Bahwa Setelah menikah, dan kemudian bertempat tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi II sikapnya mendadak berubah dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat Rekonvensi bahkan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pun tidak pernah;



15. Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi II pada persidangan tanggal 22 April 2017 yang lalu kini baru di ketahui jika ternyata antara Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II ternyata masih hidup serumah dan tidak bercerai, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi merasa di permainan Oleh Para Tergugat Rekonvensi;
16. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dalam persidangan yang lalu pada tanggal 22 Maret 2017, Tergugat Rekonvensi I mengetahui dan menyetujui jika Tergugat Rekonvensi II Menikah dengan Penggugat Rekonvensi, namun di lain sisi justru Tergugat Rekonvensi I Mengajukan Permohonan Pembatalan ke Pengadilan Agama Klaten, hal ini jelas-jelas membuat Penggugat Rekonvensi kesal dan sakit hati karena merasa semakin dipermainkan dan harga diri serta martabat keluarganya di injak-injak oleh Para Tergugat Rekonvensi;
17. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi II tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami Trauma Psikis yang hebat akibat menanggung malu atas aib yang ia alami dan bahkan pernah mencoba bunuh diri daJam keadaan hamil ditengah hutan di lereng Merapi namun dapat di cegah karena kepergok warga sekitar;
18. Bahwa akibat serangkaian perbuatan penipuan dan serangkaian kata bohong yang dilakukan Tergugat Rekonvensi II dan juga Tergugat Rekonvensi I diatas Penggugat Rekonvensi merasa di tipu luar dalam serta mengalami kerugian yang cukup banyak, diantaranya kehilangan laptop (komputer jinjing) dan uang hasil pinjaman dari orang tuanya yang di pinjam Tergugat Rekonvensi II guna keperluan menikah di Pulau Batam;
19. Bahwa Penggugat Rekonvensi memandang perbuatan yang



dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan delik pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen serta Permufakatan Jahat yang diatur dalam pasal 372, 378, 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga ada nya delik pidana pemalsuan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Penggugat Rekonvensi berencana akan melaporkan Para Tergugat Rekonvensi ke pada Pihak Berwajib dalam hal ini Kepolisian Resort Klaten;

20. Bahwa kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi diantaranya berupa ; nafkah terhutang dan biaya persalinan serta kontrol rutin ke dokter atau bidan yang dan hutang Tergugat Rekonvensi II kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, yang jika di hitung mencapai angka Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang harus di bayar secara tanggung renteng oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dikarenakan keduanya masih terikat perkawinan yang sah dan masih tinggal serumah, selambat lambatnya 1 bulan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Klaten, dan mohon pula adanya putusan serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorrad* walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atas putusan perkara ini;
21. Bahwa guna menjamin adanya kepastian pembayaran maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara No : **No. 1968/PDT.G/2016/PA.Klt** pada Pengadilan Agama Klaten meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Mranggen RT 003 RW 002, Oesa Borangan, Kecamatan manisrenggo, Kabupaten Klaten;

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi kami diatas maka
Hal. 11 dari hal. 22 Putusan No. 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt



kami dalam perkara ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pemeriksa perkara No : **No. 1968/PDT.G/2016/PA.Kit** pada
Pengadilan Agama Klaten untuk dapat menjatuhkan Putusan
sebagaimana berikut ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Turut Termohon I.** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat Formil Gugatan;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara Ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti-rugi secara tanggung-renteng Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar : Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Mranggen RT 003 RW 002, Desa



Borangan, Kecamatan manisrenggo, Kabupaten Klaten;

4. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding hingga kasasi *Uitvoerbaar bij voorrad*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Termohon I tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan, begitu juga dengan Termohon dan Turut Termohon I dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

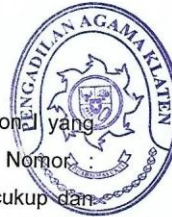
1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Nomor : 3310094704810003 tanggal 07 September 2012 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Nomor : 3310091308780001 tanggal 07 September 2012 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propensi Kep. Riau yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I telah mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Termohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 3404174409860002 tanggal 22 Maret 2016 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propensi Kep. Riau yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.2;
3. Fotokopi Sertifikat Nomor : 594/SBD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kota Batam, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 645/SI/151/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sakina Idaman (Rumah Sakit Khusus Ibu & Anak) yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.4



5. Fotokopi Faktur Instalasi Rawat Inap atas Nama Turut Termohon I yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sakina Idaman Yogyakarta, Nomor : 880/IV/REK/2017 tanggal 23 April 2017 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.5;
6. Fotokopi Faktur Instalasi Rawat Jalan atas Nama Turut Termohon I yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sakina Idaman Yogyakarta, Nomor : 009/29.04/POLI/2017 tanggal 29 April 2017 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.6;
7. Fotokopi Faktur Instalasi Rawat Jalan atas Nama Turut Termohon I yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sakina Idaman Yogyakarta, Nomor : 003/09.05/POLI/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.7;
8. Fotokopi pembelian peralatan bayi yang diterbitkan oleh Toserba WS Jl. Kaliurang Km.11 Yogyakarta, tanggal 07 April 2017 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.8
9. Fotokopi pembelian peralatan bayi yang diterbitkan oleh Toserba WS Jl. Kaliurang Km.11 Yogyakarta, tanggal 23 April 2017 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.9
10. Foto Foto pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan TT.10;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan masing-masing mereka telah menyampaikan kesimpulannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusan. Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahakamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut Turut Termohon I telah mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Termohon I, tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa) yang diajukan kepadanya;



2. Bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam;
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu dan hubungan hukum yang melandasi hubungan keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dalam perkara a quo baik Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon I adalah beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas Termohon I dan Termohon II dimana Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan bukti P.1;
6. Bahwa proses pemeriksaan permohonan pembatalan nikah bersifat kontensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Termohon harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai isteri Termohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I, dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon dan Turut Termohon I telah melanggar syari'at



dan undang-undang yang berlaku karena Termohon ternyata masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan jawaban Termohon dan Turut Termohon I serta bukti P.3, Pemohon adalah isteri sah Termohon, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon dengan Turut Termohon I sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 ditemukan fakta Pemohon adalah isteri sah dari Termohon;
2. Bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Termohon dengan Turut Termohon I pada tanggal 26 September 2016 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor:0456/060/IX/2016, tanggal 26 september 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Batam;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Termohon telah memalsukan identitas sebagai perjaka dalam pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan



sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I tidak sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Turut termohon II sebagai KUA Kecamatan Sei Bedug telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristeri dengan wanita lain. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon dan Turut Termohon I dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon dan Turut Termohon I tidak sah dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, maka kutipan Akta Nikah Nomor:0456/060/IX/2016, tanggal 26 september 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Batam harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan Akta Nikah Nomor:0456/060/IX/2016, tanggal 26 september 2016, yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Batam tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Turut Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah agar Pemohon/Tergugat rekonvensi I dan Termohon/ Tergugat Rekonvensi I dihukum untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi/ Turut Termohon I:

1. Uang ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Mranggen Rt.003/002, Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
3. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan para Tergugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Termohon I bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, lagi pula gugatan tersebut tidak cukup berasalan, maka harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Termohon I;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (Termohon I) dengan Turut Termohon I (Turut Termohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 26 september 2016;
3. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor:0456/060/IX/2016, tanggal 26 september 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Batam tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Batam) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut Termohon I seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ismiyati SH. dan Drs. Ahmad Wahib SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Masykuri, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Kuasa Turut Termohon I tanpa hadirnya Turut Termohon II;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

ttd

ttd

Dra. Hj. Ismiyati SH

Drs. Ahmad Wahib SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Masykuri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 772.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 863.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengganti Agama Klaten

ttd

Drs. Aziz Nur Eva



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arum Sari Puspa Dewi
2. NIM : 152121091
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 21 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalayu Jl.Latar Ireng Rt002/Rw002 Bumi,
Laweyan, Surakarta.
6. Nama Ayah : Moh. Komar Ma'ruf
7. Nama Ibu : Mayatri Nur Tjahyanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Tegalsari 60 lulus tahun 2009
 - b. SMP Negeri 10 Surakarta lulus tahun 2012
 - c. SMA Batik 2 Surakarta lulus tahun 2015
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Mei 2020

Arum Sari Puspa Dewi